

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam kompilasi hukum islam tidak ditemukan aturan khusus mengenai waktu tunggu bagi laki-laki untuk menikah dengan perempuan lain dalam masa idah istrinya, sedangkan dalam Surat edaran ditemukan aturan bahwa laki-laki memiliki masa tunggu. Jika ditinjau dari kekosongan dan ketetapan hukum, sangat erat dengan surat edaran tersebut, karena terdapat kebingungan manfaat. selain itu surat edaran tersebut bertujuan untuk menuju kebaikan dan kepastian hukum Islam dengan tetap memperhatikan batasan atau ketentuan hukum.
2. Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Losari Kabupaten Brebes dalam mencegah poligami terselubung sudah sesuai dengan aturan dan melibatkan aparat yang berwenang, mencegah oknum niat tidak patuh atau mensiasati hukum atau aturan yang berlaku di Indonesia terkait poligami. Apabila hal ini dibiarkan, maka akan banyak terjadi poligami yang tidak sesuai dengan syariat yaitu poligami terselubung yang dilakukan oleh mantan suami.
3. Di antara dampak implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Suami dalam Masa Idah Istri di KUA Losari positifnya adalah tentang edukasi pernikahan serta kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam pernikahan untuk mengurangi pernikahan tidak sah yang dapat menyebabkan konflik dalam keluarga. Negatifnya adalah kebingungan dan kekosongan

hukum yang terjadi karena status legalitas masih berupa surat edaran bukan ketetapan konstitusi.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran peneliti untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan seluruh Kantor Urusan Agama di Indonesia untuk menerapkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Mantan Suami dalam Masa Idah Mantan Istri.
2. Diharapkan kepada pemerintah untuk menjadikan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Mantan Suami dalam Masa Idah Mantan Istri sebagai regulasi yang bersifat mengikat.

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON